

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN DAN ALIH FUNGSI HUTAN MANGROVE DI KOTA TANJUNGPINANG

Oleh:
Syarifah Siti Nur Khatijah
180574201120

ABSTRAK

Salah satu potensi hutan mangrove adalah sebagai pencegah abrasi pantai Namun dalam perkembangan pembangunan, banyak kali hutan mangrove di alih fungsikan dan juga di hancurkan karena kepentingan pembangunan oleh orang perorangan maupun perusahaan pengembang. Pelaku penegakan hukum atas pembabatan mangrove ditentukan atas status kawasannya. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, berhak mengusut dan memidanakan apabila kawasan yang dilanggar merupakan wilayah hutan konservasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap Perusakan dan alih fungsi hutan mangrove di Kota Tanjungpinang. Untuk mengetahui hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap Perusakan dan alih fungsi hutan mangrove di Kota Tanjungpinang. Metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris dengan informan 4 orang dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Upaya penegakan hukum terhadap Perusakan dan alih fungsi hutan mangrove di Kota Tanjungpinang ditemukan bahwa upaya yang dilakukan adalah mengatasi masalah ini Pemerintah selalu memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan atau kebijaksanaan lainnya. Hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap Perusakan dan alih fungsi hutan mangrove di Kota Tanjungpinang ditemukan bahwa Fungsi koordinasi belum optimal, karena terlihat masih banyak titik-titik mangrove yang ada di Kota Tanjungpinang, rusak dan dipergunakan untuk kegiatan masyarakat yang akhirnya dapat merusak ekosistem mangrove bahkan beberapa mangrove sudah di timbun. Lemahnya koordinasi dimana tidak adanya kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang dan Dinas Lingkungan Hdup dan kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perusakan, Ahli Fungsi, Hutan Mangrove

**LAW ENFORCEMENT EFFORTS AGAINST THE DESTRUCTION AND
CONVERSION OF MANGROVE FORESTS IN TANJUNGPINANG CITY**

By:
Syarifah Siti Nur Khatijah
180574201120

ABSTRACT

One of the potentials of mangrove forests is to prevent coastal abrasion. Law enforcers for mangrove clearing are determined by the status of the area. The central government, in this case the Ministry of Forestry, has the right to investigate and prosecute if the area being violated is a conservation forest area. The purpose of this study was to determine law enforcement efforts against the destruction and conversion of mangrove forests in Tanjungpinang City. To find out the obstacles in law enforcement efforts against the destruction and conversion of mangrove forests in Tanjungpinang City. The method used is Empirical Legal Research with 4 informants and data collection techniques of observation, interviews and documentation. The results of the research in this study can be concluded as follows: Law enforcement efforts against the destruction and conversion of mangrove forests in Tanjungpinang City found that the efforts made were to overcome this problem. The government always provides limitations in the form of regulations or other policies. Obstacles in law enforcement efforts against the destruction and conversion of mangrove forests in Tanjungpinang City found that the coordination function was not optimal, because it was seen that there were still many mangrove spots in Tanjungpinang City, damaged and used for community activities which could eventually damage the mangrove ecosystem and even some Mangroves have been stockpiled. Weak coordination where there is no cooperation between the Tanjungpinang City Environment Service (DLH) and the Riau Archipelago Province Environment and Forestry Service.

Keywords: Law Enforcement, Destruction, Function Expert, Mangrove Forest